



PENGANTAR ILMU POLITIK

Muhammad Muthahari Ramadhani, Andi Hartati,
Firzhal Arzhi Jiwantara, Ade Putra Ode Amame,
Ricky Santoso Muharam, Christina Bagenda,
Yeyen Subandi, Sumirahayu Sulaiman, Marno Wance,
Suandi, Lusi Andriyani, Marlinda Irwanti Poernomo,
Joseph Eliza Lopulalan.



PENGANTAR ILMU POLITIK

Muhammad Muthahari Ramadhani, Andi Hartati,
Firzhal Arzhi Jiwantara, Ade Putra Ode Amane,
Ricky Santoso Muharam, Christina Bagenda,
Yeyen Subandi, Sumirahayu Sulaiman, Marno Wance,
Suandi, Lusi Andriyani, Marlinda Irwanti Poernomo,
Joseph Eliza Lopulalan.

PENGANTAR ILMU POLITIK

Tim Penulis:

Muhammad Muthahari Ramadhani, Andi Hartati, Firzhal Arzhi Jiwantara,
Ade Putra Ode Amare, Ricky Santoso Muharam, Christina Bagenda,
Yeyen Subandi, Sumirahayu Sulaiman, Marno Wance, Suandi, Lusi Andriyani,
Marlinda Irwanti Poernomo, Joseph Eliza Lopulalan.

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

N. Rismawati

ISBN:

978-623-459-221-4

Cetakan Pertama:

November, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telpon (022) 87355370

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul Pengantar Ilmu Politik ini telah dapat di terbitkan untuk dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak. Pengantar Ilmu Politik, mengantarkan para pelajar pada pemahaman dasar ilmu politik, sehingga para pelajar memahami pengertian dasar, konsep dasar, ruang lingkup bahasan, mendefinisikan peristiwa politik, dan memahami manfaat pembelajaran ilmu politik.

Dimulai dari pemahaman umum, apa itu Politik, para pelajar diajak untuk berpikir tentang hakikat ilmu politik, manusia, yang dalam keseharian kehidupannya, tak lepas dari peristiwa politik, mereka terlibat langsung dalam kegiatan politik. Karena itulah, tidak ada alasan untuk tidak belajar ilmu politik. Dalam pemahaman berikutnya, para pelajar diajak berpikir dan mendiskusikan, apa itu Ilmu Politik, apa saja yang dipelajari, mengapa ilmu politik Ada, bagaimana Ilmu Politik Dibangun. Pembahasan berlanjut, dari hal-hal yang biasa diamati mahasiswa sehari-hari, yang dapat dikategorikan dan didefinisikan sebagai kegiatan dan peristiwa politik, yakni yang kira-kira dapat dianggap sebagai Objek Kajian ilmu politik (landasan Ontologis ilmu politik), ke hal-hal yang bersifat substansial dari mana dan bagaimana ilmu politik Dibangun (landasan Epistemologis ilmu politik). Disinilah para pelajar dikenalkan dengan dasar-dasar Filsafat Politik, Pemikiran Politik, Ideologi.

Politik, dan mendiskusikannya serta menariknya ke ranah kontekstual kekinian, yakni tentang bagaimana kira-kira filsafat, pemikiran dan ideologi dan teori politik tersebut dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa politik.

Dalam kaitan ini para pelajar juga diperkenalkan pada Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari ilmu politik, Konsep Dasar ilmu politik dan Asumsi Dasar ilmu politik. Dilanjutkan dengan membahas sub-sub materi bahasan ilmu politik, seperti: negara, pemerintahan, birokrasi,

kebijakan publik, *civil society*, sistem kepartaian, pemilu, kepemimpinan politik, konflik, perilaku, partisipasi politik, sistem politik, pembangunan politik, politik global, hubungan internasional, para pelajar diajak dalam pemikiran tentang manfaat pembelajaran ilmu politik, hingga secara aplikatif-kontekstual. Inilah landasan Aksiologis ilmu politik. Ilmu politik bukanlah ilmu yang berhenti di angkasa, melainkan merupakan Ilmu yang dilandaskan atas Metode ilmiah, dan dapat digunakan. Menilik keluasan spektrum kajian ilmu politik, para pelajar dipersilakan untuk mencoba memikirkan dan mencontohkan jangkauan peristiwa, kajian ilmu politik, yang kemudian disinkronkan dengan metode *brainstorming* dan diskusi, untuk dideskripsikan secara sistematis, ke dalam beberapa pembahasan kelas.

Oleh karena itu buku yang berjudul Pengantar Ilmu Politik ini hadir sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi Pengantar Ilmu Politik. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya terkait Pengantar Ilmu Politik.

November, 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	1
A. Pendahuluan	2
B. Teori dan Model dalam Konteks Ilmu Politik	5
C. Peran Strategi dalam Ilmu Politik	10
D. Pesan dan Efek dalam Konteks Ilmu Politik	12
E. Rangkuman Materi	19
BAB 2 HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU SOSIAL LAINNYA	27
A. Pendahuluan	28
B. Hubungan Ilmu Politik dengan Sosiologi	29
C. Hubungan Ilmu Politik dan Antropologi	31
D. Hubungan Ilmu Politik dan Ilmu Ekonomi	33
E. Hubungan Ilmu Politik dengan Psikologi	34
F. Hubungan Ilmu Politik dan Ilmu Hukum	36
G. Rangkuman Materi	38
BAB 3 SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU POLITIK	41
A. Pendahuluan	42
B. Sejarah Perkembangan Ilmu Politik	43
C. Perkembangan Ilmu Politik Sebagai Sebuah Disiplin Ilmu	46
D. Kesimpulan	54
E. Rangkuman Materi	55
BAB 4 DEMOKRASI	57
A. Pendahuluan	58
B. Pengertian Demokrasi	59
C. Demokrasi Sebagai <i>System</i>	61
D. Hakikat Demokrasi	62
E. Pilar Demokrasi	63
F. Pemikiran Tentang Demokrasi Indonesia	66
G. Perkembangan Demokrasi di Indonesia	67
H. Pentingnya Demokrasi Sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern	70

I. Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik Tentang Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila.....	71
J. Sumber Nilai Demokrasi	73
K. Refleksi Demokrasi dan Fenomena Sosial Indonesia	76
L. Demokrasi Pancasila	79
M. Rangkuman Materi	81
BAB 5 HAK ASASI MANUSIA	85
A. Pendahuluan.....	86
B. Pengertian Hak Asasi Manusia	87
C. Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia.....	88
D. Hak Asasi Manusia di Indonesia	91
E. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.....	94
F. Rangkuman Materi	96
BAB 6 KONSEP POLITIK, TEORI POLITIK DAN KEKUASAAN	101
A. Pendahuluan.....	102
B. Konsep-Konsep dalam Ilmu Politik	104
C. Teori Politik.....	106
D. Kekuasaan.....	111
E. Rangkuman Materi	118
BAB 7 BUDAYA POLITIK, SOSIALISASI POLITIK, DAN KOMUNIKASI POLITIK.....	121
A. Budaya Politik	122
B. Sosialisasi Politik	126
C. Komunikasi Politik	130
D. Rangkuman Materi	132
BAB 8 SISTEM POLITIK.....	135
A. Pendahuluan.....	136
B. Pengertian Sistem Politik.....	137
C. Sejarah Sistem Politik	138
D. Ciri-Ciri Umum Sistem Politik.....	139
E. Fungsi Sistem Politik	139
F. Macam-Macam Sistem Politik	141
G. Hubungan Sistem Politik dengan Lingkungannya	142
H. Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Politik.....	144
I. Rangkuman Materi	145

BAB 9 PARTISIPASI POLITIK DAN PARTAI POLITIK	149
A. Konsep Partisipasi Politik	150
B. Faktor Penyebab Partisipasi Politik	151
C. Tipologi Partisipasi Politik	155
D. Teori Partai Politik	157
E. Fungsi Partai Politik	158
F. Rangkuman Materi	165
BAB 10 KONSTITUSI DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN	169
A. Pendahuluan	170
B. Sejarah Pertumbuhan Konstitusi	170
C. Pengertian Konstitusi	171
D. Sifat-Sifat Konstitusi	175
E. Materi Muatan Konstitusi	183
F. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi	187
G. Klasifikasi Konstitusi	188
H. Pemisahan Kekuasaan	190
I. Rangkuman Materi	197
BAB 11 EKSEKUTIF DAN BADAN-BADAN PEMERINTAH LAINNYA	201
A. Pendahuluan	202
B. <i>Trias Politica</i>	203
C. Definisi Eksekutif	205
D. Peran Utama Eksekutif	206
E. Eksekutif dan Kepemimpinan	207
F. Presiden	208
G. Perdana Menteri	210
H. Kabinet dan Efektivitas Kinerja Eksekutif	211
I. Masa Jabatan Eksekutif	211
J. Rangkuman Materi	212
BAB 12 LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM	215
A. Pendahuluan	216
B. Pengertian Lembaga Legislatif	219
C. Pengertian Pemilihan Umum	225
D. Rangkuman Materi	234

BAB 13 BADAN YUDIKATIF	237
A. Pendahuluan.....	238
B. Pembahasan Materi	238
C. Rangkuman Materi	257
GLOSARIUM	261
PROFIL PENULIS	268



PENGANTAR ILMU POLITIK

BAB 1: PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Muhammad Muthahari Ramadhani, S.I.Kom., M.I.Kom

FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan

BAB 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Politik

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*). Dalam negara-kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrey Heywood (1992), politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, (2017). Pakarkomunikasi.com: Teori Hipodermik-Asumsi-Konsep-Kritik
- Anonim, (2015). Memenangkan Pemilihan Umum 2014 di Kabupaten Sragen,
- Ardianto, dkk. (2012). Komunikasi Massa . Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta :
- Arifin, Anwar. (2013). Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan
- Arrianie, Lely. (2015) Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik.
- Aufa, M., Saragih, S., & Minarni, A. (2016). Development of learning devices through problem based learning model based on the context of Aceh cultural to improve mathematical communication skills and social Skills of SMPN 1 Muara Batu students. Journal of Education and Practice, 7(24), hlm. 232-248.
- Basu, Swastha & Irawan. (2001). Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta: Liberty.
- Cangara, Hafied. (2015). Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT
- Effendy, Onong Uchjana. (2013). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Erwin Jusuf T. (2019). Komunikasi Politik Ditinjau dari Perspektif Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, dan Komunikasi Islam. Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah. 16(1): 1-18.
- Hikmat, M Mahi. (2014). Komunikasi Politik: Teori dan Praktik Dalam Pilkada Langsung.
- Kaid, Lynda Lee, (2011) Hanbook Of Political Communication Research. London: Komunikasi Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kriyantono, Rachmat. (2015). Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: Kencana.

- McQuail, Denis (1987): Mass Communication Theory: An Introduction (2nd edn). London:
- Morissan. (2010). Periklanan: Komunikasi Pemasaran Terpadu. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Nimmo, D. (2011). Komunikasi Politik : Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: Goodyear Publishing Co.
- Nina Maulida R, DR. Hamdani M. (2018). Pola Komunikasi Politik Illiza Sa'aduddin Jamal Menjelang Pilkada Serentak Aceh Tahun 2017. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah. 3(3): 1-14.
- Nuruddin, (2013) Pengantar Komunikasi Massa, cetakan V , Jakarta, PT. Rajagrafindo
- Nurudin. (2014). Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pawito, (2017). Komunikasi Politik Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta: Persada.
- Pujono, dkk. (2016). Strategi Komunikasi Politik Calon Legislatif Partai Golkar dalam RajaGrafindo Persada,
- Rangkuti, Freddy. (2009). Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication. Jakarta : PT. GramediaPustakaUtama.
- Rekatama Media, (2012). Saeri, Ardin Ode. Komunikasi Politik Kader Partai Dalam Pemilihan Ketua DPD
- Suryadi, Edi. (2018). Strategi Komunikasi Sebuah Analisis Teori dan Praktis di Era Global. Bandung : Rosda
- Sutisna. (2003). Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Syafiie, Inu Kencana. Ilmu Politik. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Tabroni, Roni. (2016), Komunikasi Politik Pada Era Multimedia. Bandung: Simbiosis
- Wahid, U. (2016). Komunikasi Politik: Teori, Konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru. Simbiosis Rekatama Media.
- Winarno, B. (2007). Sistem politik Indonesia era reformasi. Gramedia Pustaka Utama.



PENGANTAR ILMU POLITIK

BAB 2: HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU SOSIAL LAINNYA

Andi Hartati, S.Sos., M.A

Universitas Tompotika Luwuk

BAB 2

HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU SOSIAL LAINNYA

A. PENDAHULUAN

Pada abad ke-19, ilmu pengetahuan tergabung menjadi satu, sampai akhirnya terbagi-bagi menjadi beberapa disiplin yang terpisah. Tetapi para ahli ekonomi, psikologi, antropologi, sosiologi, seperti halnya juga para ahli ilmu politik, kemudian merasa tertarik untuk mempelajari masalah-masalah yang sama tentang manusia, meskipun dari segi yang berbeda-beda.

Dengan timbulnya sejumlah besar Negara-negara baru di dunia, seperti di Asia, Afrika dan Amerika Latin, para ilmuwan politik di Amerika Serikat memandang perlu untuk semakin menjalin kerja sama dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, dalam mencari suatu pemahaman yang tepat terhadap segenap sifat keterpaduannya. Sebagai akibatnya, para ahli ekonomi, sosiologi, psikologi, antropologi dan politik harus saling bahu membahu dalam usaha tersebut. Untuk pertama kalinya suatu gerakan nyata yang lebih mengarah kepada adanya satu ilmu sosial dari beberapa ilmu sosial mulai menemukan bentuknya (Miriam Budiardjo, 2008).

Pada hakikatnya semua ilmu sosial termasuk di antaranya ilmu politik mempelajari perilaku manusia serta cara-cara mereka hidup dan bekerja sama. Ilmu sosial dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang membahas fenomena atau gejala sosial menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya. Di sisi lain, ilmu politik diposisikan sebagai sub ordinat dari ilmu sosial dan diposisikan sejajar dengan ilmu sosial. Pemaknaan bahwa

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, M., Soeseno, N., & Evaquarta, R. (2014). Ilmu Politik: Ruang Lingkup dan Konsep. *Modul*, 42(12), 1–61. <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ISIP4212-M1.pdf>
- Dora, N., Hum, M., Endayani, H., Pd, M., Susanti, E., & Ed, M. P. (n.d.). *Pengantar Ilmu Sosial* (M. P. Dr. Eka Susanti & Desain (eds.); Issue 57). CV. Widya Puspita Jln.
- Hamid, R. S., Abror, A., Anwar, S. M., & Hartati, A. (2022). The role of social media in the political involvement of millennials. *Spanish Journal of Marketing - ESIC*, 26(1), 61–79. <https://doi.org/10.1108/SJME-08-2021-0151>
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (R. P. Muhammad Riyadh (ed.); 1st ed., Vol. 1). Gramedia Pustaka Utama. https://himia.umj.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/Miriam_Budiardjo_Dasar-Dasar_Ilmu_Politikz-lib.org_.pdf
- Neumann, F. L. (1950). Approaches to the Study of Political Power. *Political Science Quarterly*, 65(2), 161. <https://doi.org/10.2307/2145519>
- Soekanto, S. (1988). Ilmu Hukum dan Politik. *Article*, 230–237.
- Varma, S. . (2010). *Teori politik modern, ed, tohir efendi dkk*.
- Winarno, B. (2013). Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Filsafat, Teori Dan Metodologi. *Jurnal UPN Yogyakarta*, 17(1),3.



PENGANTAR ILMU POLITIK

BAB 3: SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H., M.H

Universitas Muhammadiyah Mataram

BAB 3

SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berbicara masalah perkembangan ilmu politik tentu kita tidak akan terlepas dari pembicaraan tentang perjalanan waktu. Waktu memiliki peran penting atas perkembangan ilmu politik dan waktu juga membuat kita sadar akan pentingnya ilmu politik sebagai alat penopang tatanan masyarakat agar menjadi bangsa yang lebih maju. Pentingnya hal tersebut membuat masyarakat sudah menerapkan pengajaran tersebut pada setiap jenjang Pendidikan.

Waktu yang terus berjalan membuat perubahan yang sangat jelas bagi perkembangan ilmu politik dan untuk memahami hal tersebut tentu masyarakat dituntut untuk memahami terlebih dahulu tentang sejarah perkembangan ilmu politik.

Ilmu Politik merupakan sebuah kerangka atau cabang-cabang dari ilmu ilmu sosial lainnya yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas. Ilmu politik bisa dikatakan masih memiliki usia yang masih muda dikarenakan ilmu politik baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling berhubungan satu sama lain.

politik perkembangan ilmu politik terbagi pada tiga periode yaitu, periode tradisional, behaviorisme (pendekatan perilaku) dan *post* behaviorisme (pendekatan pasca perilaku).

TUGAS DAN EVALUASI

1. Bagaimana Asal Usul Kata Politik?
2. Apa yang dimaksud dengan ilmu politik?
3. Kenapa ilmu politik dikatakan sebagai ilmu sosial yang masih muda?
4. Bagaimana perkembangan ilmu politik di Indonesia?
5. Bagaimana perkembangan ilmu politik sebagai disiplin ilmu?

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary, Negara Hukum Indonesia, *Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995
- Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: CV.Rajawali, 1988
- Donny Gahril Adian, *Arus Pemikiran Kontemporer : Atheisme, Positivisme Logis, Neo Marxisme, Posmodernisme dan Post Ideology Syndrome*, Yogyakarta : Jalasutra
- Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasa Memahami Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Lyman Tower Sargent, *Ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1986
- Miriam Budiardjo, *Dasar- Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- S.P. Varma, *Teori Politik modern*, Jakarta: Rajawali, 1987



PENGANTAR ILMU POLITIK

BAB 4: DEMOKRASI

Ade Putra Ode Amame, S.Sos., M.Si

Universitas Muhammadiyah Luwuk

BAB 4

DEMOKRASI

A. PENDAHULUAN

Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk mengambil keputusan. Dimana keputusan mempengaruhi kehidupan setiap orang. Implikasi lainnya adalah bahwa masyarakat berfungsi sebagai otoritas tertinggi. Sistem pemerintahan ini memungkinkan semua warga negara untuk berpartisipasi secara aktif. Keterlibatan ini dapat diwujudkan atau langsung dalam perumusan dan pengesahan peraturan perundang-undangan. Setiap pakar memiliki interpretasinya masing-masing tentang demokrasi. Meski semuanya terangkum dalam satu tujuan yang sama.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana semua rakyat dapat berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan atau diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Negara Indonesia telah menempuh proses dari perkembangan demokrasi, pada tahun (1945-1959) pada masa Republik Indonesia I yaitu demokrasi konstitusional, Masa Republik Indonesia II (1959-1965) atau masa demokrasi terpimpin, Masa Republik Indonesia III, Masa Demokrasi Pancasila (1965-1998), sejauh ini telah mengalami revolusi dan perubahan aparatur pemerintahan menuju reformasi, yaitu masa Republik Indonesia V (1998 hingga sekarang), Berbagai dinamika perubahan pemilihan umum, kerukunan dapat tercipta dan demokrasi Indonesia sejalan dengan Pancasila dari sila keempat atau sistem pemilihan umum hanya dipergunakan sebagai semiotik atau sekaligus sebagai tolak ukur dari demokrasi itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Astawa, I. P. A. (2017). Materi Kuliah Kewarganegaraan Demokrasi Indonesia. *Universitas Udayana*, 1–11.
- Dr. Drs. Ismail, M.Si Dra. Sri Hartati, M. S. (2020). *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia)* (N. Arsalan (ed.)). CV. Penerbit Qiara Media.
- Fatkhurohman. (2011). *Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi*. IV(2), 37–58.
- Galih Puji Mulyono; Rizal Fatoni. (2019). Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 97–107.
- Pancasila, D., Tunggal, B., & Solusi, I. (n.d.). *Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas Idjang Tjarsono* *. 881–894.
- Pradana, R. A. (2020). Sosial, Politik, dan Ekonomi Kesejahteraan Sosial: Refleksi Demokrasi dan Fenomena Sosial Indonesia. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan ...*, 3(2), 87–101. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3717>
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251–264. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290>
- Santika, I. G. N., Purnawijaya, I. P. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila. *Seminar Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 74–85.
- Sudrajat, A. (2016). DEMOKRASI PANCASILA dalam PERSPEKTIF SEJARAH. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10763>
- Sunarso. (2015). *Membedah Demokrasi*. UNY Press.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). *Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*.



PENGANTAR ILMU POLITIK

BAB 5: HAK ASASI MANUSIA

Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

BAB 5

HAK ASASI MANUSIA

A. PENDAHULUAN

Hak sebagai unsur normatif yang melekat di diri setiap orang atau manusia dimana dalam penerapannya berada di ruang lingkup persamaan dan kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu dan instansi (Aminullah, 2018). Persoalan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu sesuatu yang sering dibicarakan serta dibahas terutama pada era reformasi. Malah tentang hak asasi manusia serta soal perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari hal penting dari kemajuan demokrasi (Budiardjo, 2016).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa sebagai penyelenggara negara di Republik Indonesia (RI) harus berlandaskan terhadap hukum yang berlaku termasuk persoalan tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Wacana yang sering hangat tentang penerapan HAM berada di skala nasional, yaitu universalisme, relativisme budaya. Universalisme menyatakan akan semakin banyak budaya “primitif” yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya Barat (Triputra, 2017).

Dari sudut pandang manusia sebagai entitas sosial, masalah hak asasi manusia sangat rumit. Banyak orang bertabrakan dan satu kelompok saling tumpang tindih. Tentu saja, hak dan kebebasan adalah milik semua orang. Dalam kehidupan kelompok, hak untuk mengatur hidup bersama ini diambil alih atau didelegasikan kepada kelompok. Dalam pengembangan kelompok masyarakat Menjadi lebih kuat, manusia hanya tunduk pada tatanan umum kehidupan. Kehidupan dan kebebasan

DAFTAR PUSTAKA

- American Association for the International Commission of Jurists. (1985). *on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*. www.icj.org
- Aminullah. (2018). Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM). *JUPE*, 3(3), 5–19. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507><http://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2017.05.005><https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>
- Budiardjo, M. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Hesti Armiwulan. (2015). Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 493–502. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502>
- Hestu Cipto Handoyo. (2003). *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- MD, M. M. (2000). Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(14), 1–30. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/5005>
- Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 201–212. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i2.5167>
- SafitriIstintintyas, A. (2019). Sejarah HAM dan Sejarah Pemikiran HAM : Kategori Kekerasan Seksual Di Kampus. *Indonesian Journal of Gender Studie*, 2(2), 57–76.
- Smith, R. K. M., Christian, N. H., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Riyadi, E. (2012). *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*.
- Sukendar. (2017). Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *Administrasi Negara, Volume 3*(2, Januari-April), 70–76.

- Suwardi. (2005). *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia* (Cetakan 1). PT Reflika Aditama.
- Triputra, Y. A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai HAM Global Ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 279–300. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art6>
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis. *Humanika*, 2(18).



PENGANTAR ILMU POLITIK

BAB 6: KONSEP POLITIK, TEORI POLITIK DAN KEKUASAAN

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E

Fakultas Hukum Universitas Flores

BAB 6

KONSEP POLITIK, TEORI POLITIK DAN KEKUASAAN

A. PENDAHULUAN

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Pada kodratnya ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Oleh sebab itulah politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya.

Menurut Anton H. Djawamaku, Sebab manusia adalah inti utama dari politik, oleh sebab itu apapun alasannya pengamatan atau telaah politik tidak hanya meninggalkan faktor manusia. Bahwa pribadi seseorang manusia adalah unit dasar empiris analisa politik (1985: 166). Oleh sebab itu kata Politik yang berasal dari kata *politic* (Inggris) menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut diartikan: *acting or judging wisely, well judged, prudent* (A.S. Hornby, 1974: 645).

Istilah politik berkembang sedemikian rupa sehingga diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan memiliki 3 arti (WJS Poerwadarminta, 1983: 763), yaitu segala urusan dan tindakan/kebijaksanaan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan sesuatu negara terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, serta juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan yaitu ilmu politik.

Dalam kehidupan bermasyarakat istilah politik pertama kalinya dikenal pada masa Plato, dalam bukunya yang berjudul *Politeia* yang pula dikenal dengan istilah Republik (deliar Noer, 1982: 11-12), dan selanjutnya

Politik dan kekuasaan (*power*) menjadi dua sisi mata uang yang saling berdekatan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Keduanya juga menyentuh aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, sosial. Dan budaya. Sementara kekuasaan merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Max Weber memaknai kekuasaan sebagai sarana bagi seseorang untuk mencapai keinginannya.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Konsep-konsep pokok manakah yang menjadi dasar perumusan definisi ilmu politik ?
2. Jelaskan perbedaan antara ideologi politik dari filsafat politik dan teori politik empiris !
3. Apa yang dimaksud dengan Teori Politik? Dan sebutkan teori-teori Politik yang saudara ketahui !
4. Mengapa teori politik penting dalam ilmu politik ?, jelaskan jawaban saudara!
5. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan kekuasaan dan berikan contohnya !

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hoogerwerf. (1985). Politikologi, Jakarta: Erlangga
- A.S. Hornby. (1974). Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, London: Oxford University Press
- Asep Sahid Gatara & Subhan Sofhian.(2012). Pendidikan, Bandung: Fokusmedia
- Bintoro Tjokroadmidjojo.(1974). Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta : LP3S
- George Ritzer & Dauglas J. Goodman.(2007). Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Kencana
- Hotman Siahaan.(1986). Pengantar Kearah Sejarah Teori sosiologi, Jakarta: Penerbit Erlangga

- Imam Hidayat.(2009). Teori-teori Politik, Malang: Setara Press
- Jurnal Komunikasi Malaysian.(2013). Journal of Cominication, Jilid 29 (1)
- Jurnal Pemberdayaan Komunitas.(2004). Volume 3, Nomor: 3, September, 2004.
- Landmard. (2000). Issues and Methods in Comparative Politics: An introduction, London, New York: routledge
- Macridis R.C. (1983). Contemporary Political Ideologies, movement and regimes. Boston: Little, Brown and Company
- Magnis Suseno.(1987). Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: PT. Gramedia
- Maksum Syahri Lubis.(2008) Diktat Teori Politik, Fakultas Isopol Universitas Medan Area
- Miriam Budiardjo.(1983). Dasar-dasar Ilmu Politik, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
-(2008). Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Muji Sutrisno & Handar Putranto.(2005). Teori-teori Kebudayaan, Yogyakarta: Kanisius
- Rafael Raga Maran.(2001). Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Rineka Cipta
- Rieke Diah Pitaloka.(2004). Rekayasa Negara Menular Ke masyarakat, Yogyakarta: Galang Press
- Soerjono Soekanto. (1994). Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press
- T. Hani Handoko.(2011). Manajemen, Yogyakarta: bpfe-Yogyakarta.



PENGANTAR ILMU POLITIK

BAB 7: BUDAYA POLITIK, SOSIALISASI POLITIK, DAN KOMUNIKASI POLITIK

Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A

Universitas Respati Yogyakarta

BAB 7

BUDAYA POLITIK, SOSIALISASI POLITIK, DAN KOMUNIKASI POLITIK

Budaya politik adalah sistem nilai dan juga keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, dan budaya politik juga merupakan produk dari sebuah proses pendidikan atau proses sosialisasi politik dalam sebuah atau suatu masyarakat. Di dalam budaya politik dan sosialisasi politik berkaitan juga dengan komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi dari sistem politik untuk membandingkan berbagai sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam perihal ketiganya.

A. BUDAYA POLITIK

Budaya politik dimaknai sebagai pola pikir, sikap, perilaku, dan peralatan yang berkenaan dengan kebijakan dan juga pemerintahan. Dalam sikap politik yang dilandasi kearifan dapat tumbuh kebajikan atau kebaikan dalam politik itu sendiri. Menurut Miriam Budiardjo, aspek penting dalam suatu sistem politik yaitu budaya politik yang mencerminkan faktor yang subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan politik, seperti norma, pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik menurut Amond dan Verba bahwasannya budaya politik merupakan sikap orientasi yang dimiliki oleh warga masyarakat secara khas terhadap sistem politik dan juga peranan warga masyarakat dalam sistem tersebut (Sahya Anggara,

DAFTAR PUSTAKA

- Damsar. (2010). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dudih Sutrisman. (2008). Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan dan Mahasiswa. Jakarta: Guepedia Publisher.
- Haryanto. (2018). Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal. Yogyakarta: Research Center for Politic and Government.
- Hofmeister dan Grabow. Political Parties: Funtions and Organisation in Democratic societies.
- Mirza Shahreza. (2018). Pengertian Komunikasi Politik. <https://www.researchgate.net/publication/326143322>
- Ramlan Surbakti. (1999). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Rusadi Kantaprawira, H., Prof.Dr., SH. (1997). Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar. Bandung: CV. Sinar Baru.
- Sahya Anggara. (2013). Sistem Politik Indonesia. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Susi Fitria Dewi. (2017). Sosiologi Politik. Yogyakarta: Gre Publishing.
- Umaruddin Masdar. (1999). Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik. Yogyakarta: LKIS.
- Zulfikri Sulaeman. (2010). Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Zulkarimein Nasution. (1990). Komunikasi Politik Suatu Pengantar. Jakarta: Ghalia Indonesia.



PENGANTAR ILMU POLITIK

BAB 8: SISTEM POLITIK

Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Flores

BAB 8

SISTEM POLITIK

A. PENDAHULUAN

Sistem politik pada suatu negara kadang bersifat relatif, yang dimana hal ini dipengaruhi beberapa elemen-elemen yang pada akhirnya membentuk sistem tersebut. Terdapat faktor sejarah dalam perpolitikan di suatu negara. Namun pengaruh sistem politik negara lain dapat memberi andil dan kontribusi pada pembentukan sistem yang berada di suatu negara. Seperti halnya sistem politik di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu selalu mengalami perubahan.

Sistem politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan, penjajahan, kemerdekaan sampai masa reformasi sekarang. Para *founding father* bangsa yang dimana telah merumuskan dengan seksama sistem politik yang dimana menjadi acuan didalam pengelolaan negara. Dengan melihat kondisi dan situasi bangsa saat ini sistem politik mengalami perkembangan secara signifikan yang dimana bermunculan lembaga dan sistem yang baru dalam merespon permasalahan bangsa yang semakin kompleks.

Adapun salah satu syarat penting untuk memahami bagaimana sistem politik Indonesia yaitu dengan pengembangan wawasan yang melibatkan institusi-institusi nasional dan internasional. Yang dimana memiliki arti bahwa lingkungan internal dan eksternal sebagai batasan dari suatu sistem politik Indonesia harus dipahami terlebih dahulu.

Suatu sistem politik yang kuat dapat menghadapi berbagai tekanan politik, baik yang muncul dari sistem politik itu sendiri maupun tekanan yang datang dari luar sistem politik tersebut. Tekanan terhadap sistem

DAFTAR PUSTAKA

- Adan Ghazali Abbas. (2009). Sistem Politik/Demokrasi Indonesia; Dari Masa ke Masa diakses melalui <http://ddii.acehprov.go.id>
- Estu Putri. (2010). Sistem Politik diakses melalui <http://estuputri.wordpress.com/>
- Mariam Budiarto, dkk. (2003). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia.
- Nadia. (2010). Sistem diakses melalui <http://sayanadia.wordpress.com/>
- Nazarudin Sjamsuddin. (1993). Dinamika Politik Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho Notosusanto. (2008). Sejarah Nasional Indonesia. Balai Pustaka.
- Sukarna. (1993). Sistem Politik Indonesia, Jilid 4. Bandung : Mandar Maju.
- Young, Oran R, Simamora, Sahat. (1984). Sistem Ilmu Politik. Jakarta : Bina Aksara.



PENGANTAR ILMU POLITIK

BAB 9: PARTSIPASI POLITIK DAN PARTAI POLITIK

Marno Wance, S.IP., M.I.P

Universitas Pattimura, Ambon

BAB 9

PARTISIPASI POLITIK DAN PARTAI POLITIK

A. KONSEP PARTISIPASI POLITIK

Makna kata partisipasi yang bermakna keikutsertaan, penyetaraan pelibatan, kontribusi, peran serta dan kerja sama (Bisri, 2012). Pengertian partisipasi politik yang secara umum keterlibatan warga negara secara aktif dalam aktivitas tertentu (Sitepu, 2012). partisipasi merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan demokrasi, karena keputusan politik diperlukan partisipasi aktif masyarakat, kelompok kepentingan maupun partai politik (Berger, 1996). Partisipasi politik pemilih pemula (Wance, Suhu, 2019). Konsep partisipasi politik adalah ruang pelibatan yang digunakan untuk melaksanakan ruang aktivitas politik. Tradisi pendekatan *behavioral* (perilaku) serta *post-behavioral* (pasca tingkah laku) banyak dilakukan kajian-kajian terutama pada negara tahap berkembang atau tumbuh (Subakti, 1992).

Menurut Kaelola (2009) partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi yang terlibat aktif dalam kegiatan politik. Misalnya ikut proses pemilihan, aktif di partai politik, dapat mempengaruhi keputusan politik. Sedangkan menurut Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Science* yaitu kegiatan-kegiatan sukarela yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam mengikuti secara aktif proses pemilihan pemimpin baik secara langsung maupun tidak langsung maupun dalam proses pembuatan kebijakan publik. Menurut Sastroadmojo (1995) partisipasi politik adalah

DAFTAR PUSTAKA

- A , Rahman, H.I. 2007. Sistem Politik Indonesia. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Almond, Gabriel A., Sidney Verba. 1965. The Civic Culture. Boston, Mass: Little Brown and Company.
- Andrew Heywodd. (2013). Politik. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Andrew N, Nelson. 1997. Kamus Kanji Modern Jepang-Indonesia. Jakarta: Kesaint Blanc
- Berger, Peter L. Pyramids of Sacrifice: Political Ethics and Social Change . New York: Anchor Books, 1976.
- Bisri, Z. (2012). PARTISIPASI POLITIK DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Studi Kasus Interaksi Pattiro dengan Pemerintah Kota Semarang. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 47-55.
- Cholisin, dkk. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press.
- Dahl, Robert. (1966). Patterns of Opposition. New Haven: Yale University Press.
- Fimanzah. (2008). Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan *positioning* ideology Politik di Era Demokrasi. Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Haris, Syamsudin. 1988. Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru. Jakarta: PPW LIPI.
- Hungtington, Samuel, Nelson. (1994). Partisipasi Politik, di Negara Berkembang (terj.). Jakarta Rineka Cipta
- Joko J. Prihatmoko. 2008. Mendemokrasikan Pemilu: Dari Sistem Samapai Elemen Teknis. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mee, Wendy Ting Swee. (1997). Urbanisasi dan Perubahan Corak Pengundian Dalam Pilihanraya Parlimen 1982 dan 1990 di Sarawak. Latihan Ilmiah. Bangi: Jabatan Geografi UKM.
- Miriam Bidiardjo. (1998). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia
- Richard R. Lau & David P Redlawsk (2006). How Voters Decide: Information Processing during Election Campaigns, Cambridge University Press, UK.
- Richard S. Katz dan Wiliam Crotty. (2014). Hanbook Partai Politik. Penerbit Nusa Media. Bandung

- Rush, Michael & Althoff, Philip. (1997). *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rush, Michael, and Phillip Althoff. 1990. *Pengantar Sosisologi Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Suharyanto, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2).
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Wance, M., & Djae, R. M. (2019). Modalitas Dinasti Ahmad Hidayat Mus Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Maluku Utara 2018. *Sosiohumaniora*, 21(3), 256-268.
- Wance, M., & La Suhu, B. (2019). Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menentukan Pilihan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 4(2), 91-115.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.



PENGANTAR ILMU POLITIK

BAB 10: KONSTITUSI DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN

Suandi, S.Pd., M.Si

Universitas Sjakhyakirti

BAB 10

KONSTITUSI DAN PEMBAGIAN KEKUASAAN

A. PENDAHULUAN

Topik yang akan dibahas dalam modul ini adalah teori dan konsep tentang konstitusi dan pemisahan kekuasaan. Anda diharapkan dapat mempelajari bab ini dan memiliki tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai setelah Anda mempelajari bab ini, di antaranya:

1. Menjelaskan Pengertian dan Hakikat Konstitusi.
2. Menjelaskan Sifat Konstitusi.
3. Menjelaskan Fungsi dan Bentuk Konstitusi.
4. Menjelaskan konsep pemisahan kekuasaan.

B. SEJARAH PERTUMBUHAN KONSTITUSI

Secara etimologis antara kata “konstitusi”, “konstitusional”, dan konstitusionalisme” yang artinya sama, tetapi penggunaan atau penerapan katanya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-undang Dasar, dan sebagainya), atau Undang-undang dasar suatu negara. Sedangkan konstitusionalisme adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.

Dalam berbagai disiplin ilmu, baik hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari:

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly, (2008). Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2015 Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum. Setara Press: Malang.
- Budiardjo, Miriam. (1983). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. (1983). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Busroh, Abu Daud dan Busroh, Abu Bakar . (1982). Asas-asas Hukum Tata Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Busroh, Abu Daud. (1989). Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismaun. (1972). Pancasila Dasar Filsafat. Bandung: Karya Remaja.
- Kaelan. (2001). Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, CST, dan Sr. Kansil, Christine. (1997). Hukum Tata Negara RI. Jakarta: Rineka Cipta.
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.
- Lubis, Solly. (1982). Hukum Tata Negara. Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. (1986). Konvensi Ketatanegaraan. Bandung: Armico.
- Peraturan Perundang-undangan.
- Suny, Ismail. (1963). Pergeseran Kekuasaan Eksekutif. Jakarta: CV. Calmara
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Dasar Sementara 1950
- Zainy Z, Hasan (1985). Pengantar Hukum Tata Negara. Bandung: Alumni.



PENGANTAR ILMU POLITIK

BAB 11: EKSEKUTIF DAN BADAN-BADAN PEMERINTAH LAINNYA

Dr. Lusi Andriyani, M.Si

FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta

BAB 11

EKSEKUTIF DAN BADAN-BADAN PEMERINTAH LAINNYA

A. PENDAHULUAN

Sebuah negara akan mampu menjalankan fungsinya untuk melayani masyarakat dan sebagai wadah pertarungan kepentingan, apabila diikuti dengan fungsi-fungsi optimal dari lembaga-lembaga yang ada didalamnya. Negara juga akan maupun menjalankan fungsinya apabila terdapat kekuasaan yang sah serta berdaulat untuk mengatur rakyatnya dengan baik. Pemerintah yang berdaulat merupakan representasi dari seluruh rakyat dalam menjalankan tugas dan kehendak rakyatnya.

Dalam sistem pemerintahan, terdapat lembaga-lembaga penting sebagai bagian dan unsur pemerintah. Lembaga tersebut bagian dari trias politika, yang terdiri atas eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut menjadi wajah dari sistem dan pengelolaan yang dijalankan oleh negara. salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dan sebagai inti dari pemerintahan dan tidak dapat direduksi adalah lembaga eksekutif. Kerja sistem politik tidak akan berjalan tanpa adanya eksekutif yang mempunyai peran penting didalam merumuskan kebijakan pemerintahan dan menjamin bahwa kebijakan tersebut akan diimplementasikan dengan baik. Selain mempunyai peran penting untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, lembaga eksekutif merupakan wajah politik yang paling mudah untuk dilihat dan dikenali oleh masyarakat. Di negara yang menganut sistem demokrasi, eksekutif menjadi tolok ukur kinerja demokrasi. Dengan demikian, eksekutif menjadi sumber dari

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, H.-S. (2011). Politik Indonesia. *Politik Indonesia*, 1(95), 117–151.
- Herdiansah, A. G. (2017). Politisasi Identitas dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014. *Jurnal Bawaslu*, 3(2), 169–183.
- Heywood, Andrew (2014), Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Juanda, K. (2014). Membangun Hubungan Eksekutif dan Legislatif Daerah [Analisis Komunikasi Kebijakan Publik]. *Tasâmuh*, 11(2), 269–292.
- Roskin, Michael G. (2016). Pengantar ilmu Politik, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Thahir, B. (2019). Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai). *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. Diambil dari [http://eprints.ipdn.ac.id/5979/1/Buku Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia sebuah Bunga Rampai.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/5979/1/Buku_Pemerintah_dan_Pemerintahan_Indonesia_sebuah_Bunga_Rampai.pdf)
- Wakhid, A. A. (2013). Hubungan Pemerintah dan Birokrasi. *TaPls*, 9(2), 1–30.
- Yani, A. (2018). SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution). *Jikh*, 12(2), 119–135.
- Yulistiyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>



PENGANTAR ILMU POLITIK

BAB 12: LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM

Dr. Dra. Marlinda Irwanti Poernomo, S.E., M.Si

Universitas Sahid, Jakarta

BAB 12

LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Berbagai sistem dan metode diterapkan dalam proses pemilihan umum (pemilu) di berbagai negara di seluruh dunia. Pemilu melalui pemungutan suara dilakukan sebagai bentuk dari keikutsertaan rakyat untuk menentukan pemerintahan dan sebagai bagian dari proses demokrasi. Sistem atau metode yang diterapkan di dalam pemilu berkaitan erat dengan sistem politik dan pemerintahan yang dianut oleh setiap negara. Selain, perbedaan yang timbul dalam sistem atau metode pemilu juga dipengaruhi oleh persebaran dan jumlah penduduk serta bentang alam. Selain itu, di beberapa negara pemilihan umum tidak hanya digunakan untuk memilih anggota legislatif, tetapi juga menentukan kepala negara dan kepala pemerintahan.

Menurut penjelasan yang dikutip dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), secara garis besar ada 3 sistem pemilu yang diterapkan di dunia, yaitu Sistem Pluralitas atau Mayoritas, Sistem Proporsional, dan Sistem Campuran.

1. Sistem Pluralitas/Mayoritas (*Plurality/Majority System*)

Cara ini disebut juga sistem distrik. Dalam sistem pluralitas, wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasar atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali pada varian *Block Vote* dan *Party Block Vote*. Kandidat yang memiliki suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya. Varian dari

DAFTAR PUSTAKA

Saptohutomo Putranto Aryo, Kompas.com News Nasional Kamus Pemilu Mengenal Ragam Sistem Pemilu Legislatif dan Senator di Dunia, artikel Kompas.com - 02/06/2022, 10:28 JAKARTA, KOMPAS.com – <http://repository.unpas.ac.id/13193/5/BAB%20II.pdf#:~:text=BAB%20II%20KAJIAN%20TEORI%20A.%20%20Pengertian%20Pemilihan,%20para%20pemimpinnya%20dipilih%20berdasarkan%20suara%20mayoritas%20terbanyak.>
<https://haloedukasi.com/pemilihan-umum>
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum
<https://insanpelajar.com/lembaga-legislatif/>
<https://rumus.co.id/lembaga-legislatif/>



PENGANTAR ILMU POLITIK

BAB 13: BADAN YUDIKATIF

Joseph Eliza Lopulalan, S.Sos., M.A

Universitas Victory Sorong

BAB 13

BADAN YUDIKATIF

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum membagi kekuasaan yang menopang pemerintahan yang adil dan beradab bagi seluruh tumpah darah Indonesia pada tiga kekuasaan yakni: 1) Kekuasaan Eksekutif yang direpresentasikan oleh Presiden dan segala alat kelengkapan pemerintahan di bawahnya, 2) Kekuasaan Legislatif yang merepresentasikan *azas* demokrasi atau pemerintahan rakyat melalui para wakil rakyat pada Lembaga tertinggi Negara yakni MPR dan DPR, 3) Kekuasaan Yudikatif sebagai pengontrol pelaksana pemerintahan (Eksekutif) dalam hubungannya dengan rakyat (Legislatif) secara *independent* sesuai Pancasila dan UUD 1945. Sebagai pengontrol penerapan kedua kekuasaan lainnya, kekuasaan Yudikatif harus berdiri tegak, konsisten dan berintegritas serta *independent*, namun sejarah panjang bangsa dan Negara ini telah mencatat berbagai penyelewengan yang dilakukan ketiga kekuasaan ini yang sering disebut sebagai *trias politica* terutama yang menciderai *azas independent judiciary*.

Bab ini mengulas tentang apa itu Badan Yudikatif, kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh badan Yudikatif, perkembangan Badan Yudikatif dari masa ke masa, Lembaga-lembaga dalam Badan Yudikatif, serta tugas dan wewenang setiap lembaga pada badan Yudikatif

B. PEMBAHASAN MATERI

Secara umum, pemerintah Indonesia merujuk pada tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga Eksekutif dan Legislatif bertanggung jawab atas tata kelola bangsa dan

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djuyandi, Yusa. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Indonesia, Depok: Rajagrafindo Persada
- <https://t.me/kompascomupdate>
- Kirman dan Sunu. (2002). *Pergulatan Konstitusi*. Indonesia, Solo: Pondok Edukasi
- Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agus,. (2003). *Pengantar Hukum Internasional.*, Indonesia, Bandung : PT Alumni
- Soimin dan Sulardi,. (2004). *Hubungan Badan Legislatif dan badan Yudikatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Indonesia, Malang : UMM Press.
- Syafiie, Inu Kencana dan Azhari,.(2010). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta : Refika ADITAMA.
- www.pedulihukum.com//mekanisme-perekrutan-hakim-angung-pada.html

PROFIL PENULIS

Muhammad Muthahari Ramadhani, S.I.Kom., M.I.Kom



Penulis adalah seorang Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan konsentrasi pengajaran di bidang *Public Relations*, Kebijakan Publik dan Komunikasi Politik. Mata Kuliah yang sering diampu adalah terkait Komunikasi Politik dan *Marketing Politik*. Penulisan Karya ilmiah yang berfokus kepada keilmuan Komunikasi Politik, *Loby Politik* dan *Public Policy*. Berdiskusi, bersosialisasi dan berinteraksi dengan banyak relasi dan masyarakat. Mengutamakan kebersamaan dan kekompakan. Memiliki Motto "Belajar terus setiap hari, Proses tidak akan mengkhianati hasil". Bekerja dengan ikhlas dan tanpa pamrih adalah sudah kewajiban seorang pengajar sehingga tidak perlu menghitung berapa yang didapat, tapi apa saja ilmu yang sudah diberikan kepada orang lain.

Andi Hartati, S.Sos., M.A



Penulis lahir di Bantaeng, 8 April 1985. Lulus S1 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Palu pada Tahun 2006. Lulus S2 pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Tahun 2009. Saat ini merupakan dosen tetap Universitas Tompotika Luwuk Banggai. Menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan pada periode 2011-2015, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada periode 2015-2019 dan menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan periode 2019-2023. Buku yang sudah diterbitkan antara lain Buku Metodologi Penelitian Sosial, Desa dan Bumdes, dan Pengantar Ilmu Komunikasi. Beberapa hasil penelitian kerja sama antara pemerintah daerah antara lain; Indeks Pembangunan Gender, Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Naskah Akademis Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Banggai.

Google scholar id. VFx_kD4AAAAJ

Orcid id. <http://0000-0002-6267-2705>

Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, S.H., M.H



Penulis lahir di Desa Lenek, Kec. Lenek, Kab. Lombok Timur-NTB tanggal 8 Januari 1989, istri: dr. Mitha Ratna Dewi, Anak: Attaya Salwa Afifah (Perempuan), dan Muhammad Syafiq Thaqif (Laki-Laki), saat ini bekerja sebagai Advokat PERADI yang berkantor LAW OFFICE 108 (LO.108), Dosen Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan Mediator Terakreditasi pada Mahkamah Agung RI No. 110A/KMA/SK/VIII/2008. Pendidikan S-1 ditempuh di Universitas Mataram Tahun 2011, kemudian menyelesaikan S-2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Tahun 2014 dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Mataram Tahun 2018. Di samping sebagai Advokat dan Dosen serta Mediator, juga sebagai Sekretaris Lembaga Pendidikan ASMUNI SCHOOL MATARAM-NTB, Pengurus PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Lombok Timur-NTB, Tim Advokat dan Konsultan Hukum Pemda Kab. Lombok Utara, Staf Ahli Komisi I DPRD Lombok Barat, Tim Ahli atau Pakar Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Advokat dan Konsultan Hukum Nahdlatul Wathan Pancor, Anggota Tim Pusat Kajian Hukum Administrasi dan Perundang-undangan LAW OFFICE 108 MATARAM-NTB. Aktif dalam berbagai penelitian di bidang Hukum Administrasi dan Perundang-undangan di LAW OFFICE 108 Mataram-NTB serta aktif menulis beberapa buku, jurnal Nasional dan Internasional antara lain: Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya Pasca Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan., ISBN: 978-602-6822-64-2, Terbit November 2018, Penerbit: Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI) Jln. Swakarsa VII Nomor 28 Mataram-NTB, Email: pustakabangsa05@gmail.com, Website: www.pustakabangsa.com, Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Utang Dalam Praktek, Website: www.guepedia.com, Terbit Januari Tahun 2020, Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Website: www.guepedia.com, Terbit Februari Tahun 2020, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban, Website: www.guepedia.com, Terbit April Tahun

2020, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Tahun 2018 Judul: *The Extension Of Absolute Competence Of State Administrative Court After The Enactment Of Act Number 30 Of 2014 On Government Administration In Indonesia*, Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan), Vol 2, No 4 (2014), judul: *Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya*, Vol 6, No 3 (2018), judul: *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Jatiswara Vol.34, No.2 Juli 2019, judul: *Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi* dan lain-lain.

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si



Penulis lahir di Salati, 19 September 1985. Penulis adalah alumni sekaligus Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan Pendidikan strata dua (S2) di Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Dengan beberapa kawan menulis *ontology* puisi “Air Mata Anonim”. Juga terlibat dalam penulisan *Book Chapter* Pengantar Ilmu Administrasi Publik (*Good Governance*) dan *Marketing Politik* (*Marketing Politik dan Demokrasi*), serta tulisan lainnya, yang dalam proses penerbitan. Penulis dapat dihubungi melalui email: putrohade@gmail.com atau adeputra@unismuhluwuk.ac.id.

Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos



Penulis merupakan pria kelahiran Bekasi 27 September 1986 semasa kecil tinggal di sebuah desa bernama Cibusah Kota. Masa Pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas dihabiskan di Bekasi. Setamat SMA kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil prodi Pendidikan Kewarganegaraan (S1) kemudian melanjutkan program magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada prodi Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan

Pemerintahan Islam. Semasa sekolah dan kuliah aktif di beberapa organisasi termasuk di LSM PKBI Yogyakarta, LSM Syarikat Indonesia dan terlibat sebagai Pengawas Pemilu Kecamatan Kretek di Pilpres 2019 dan Pilkada 2020. Pernah Bekerja di beberapa sekolah seperti di SMP N 1 Cibusah, SMK N 1 Cibusah, SMP Islam Nurul Fikri *Boarding School* Anyer, *Homeschooling Primagama* (HSPG) Yogyakarta, dan kini aktif mengajar di *Homeschooling Entrepreneur* (HSE) Yogyakarta, Tutor di Universitas Terbuka dan tercatat sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta (STIPRAM) untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan mata kuliah Pancasila. Selain itu aktif menulis di beberapa jurnal nasional. Untuk berkomunikasi dengan penulis dapat melalui email penulis ricky@stipram.ac.id

Christina Bagenda, S.H., M.H., C.P.C.L.E



Penulis adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores Ende dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Pengajar Mata kuliah Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hukum Perikatan, Hukum Acara Perdata & Latihan Praktek Perdata. Selain mengajar penulis juga aktif dalam menulis *Book Chapter* di berbagai Penerbit dan juga menulis di Jurnal Terakreditasi sinta 2, 3 dan 4. Melakukan Penelitian (Penelitian kerja sama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Ende) di akhir tahun 2021 yaitu mengenai “Laporan Survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada 6 Kecamatan” serta penelitian awal Tahun 2022 yaitu: “Persepsi Mahasiswa Terhadap desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores (Dipublikasikan Di Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 4 No. 1 Tahun 2022), mengikuti berbagai pelatihan: Pelatihan Ahli Hukum Kontrak, Pelatihan Motivator, Pelatihan Publik *Speaking* dan Pelatihan *Hypno teraphys*, tanggal 10-11 Juni 2022 mengikuti Seminar Nasional di Universitas 17 Agustus Semarang dengan Tema: Membangun Sistem Hukum Indonesia

Yang Berkeadilan dan Humanis yang sekaligus mengikuti Pertemuan Akbar APPTHI. Email Penulis: bagendatitin@gmail.com

Dr. Yeyen Subandi, S.IP., M.A



Penulis lahir di Karawang 18 Januari 1979. Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2004, dan gelar *Master of Arts* dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016, dan gelar Doktor pada Program Doktorat Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2021. Dari tahun 2006 sudah aktif dalam isu-isu kemanusiaan yang bergabung di *Non-Governmental Organization* (NGO) lokal, nasional, dan internasional seperti World Bank, AusAID, USAID, dan juga isu penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia bersama tempat Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu aktif juga dalam isu penanggulangan kemiskinan bersama Kemitraan dan Word Bank. Pada tahun 2016-2017 menjadi staf pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, kemudian tahun 2018 menjadi asisten pengajar di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mulai tahun 2018 juga menjadi staf pengajar di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Respati Yogyakarta.

Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum



Penulis adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores Ende dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Sekarang menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Pengajar Mata kuliah Hukum Islam, Hukum Jaminan, Hukum Waris Islam di Fakultas Hukum. Selain mengajar penulis juga baru memulai menulis *Book*

Chapter serta penelitian awal Tahun 2022 yaitu: “Persepsi Mahasiswa Terhadap desain Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Survei pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores (Dipublikasikan Di Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 4 No. 1 Tahun 2022), Sinta 2 “*The Legal Certainty of Land Ownership Right In Registration’s Context*” yang dipublikasikan bulan April 2022 dan Sinta 4 “Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Hak Kepemilikan Tanah” yang diterbitkan bulan Juni 2022 dan pernah mengikuti pelatihan: Pelatihan Ahli Hukum Kontrak. Email Penulis: ayusulaiman13@gmail.com

Marno Wance, S.IP., M.I.P



Penulis kelahiran di Desa Oki Lama Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, 08 Maret 1991. Penulis pernah menjadi Dosen Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan UMMU Ternate (2017-2018) dan sekarang dosen tetap pada Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Pattimura, Ambon (2018-Sekarang. Menyelesaikan studi Ilmu Pemerintahan S1 di UMMU Ternate (2014), dan Sekolah Pascasarjana Magister S2 Ilmu Pemerintahan (UMY) Yogyakarta (2017). Hasil karya buku dengan judul (1). *“Politik Anggaran: Dinamika legislasi, perencanaan anggaran, komunikasi politik, proyeksi pembuatan APBD”* terbit 2020. (2). *Manuskrip: Sukses Kepemimpinan Adat di Negeri Raja-Raja* (2021). (3). *book chapter Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal*, 2021. (4). *Book chapter Hukum Administrasi Negara*, 2021. (5). *Book chapter Pengantar Ilmu Komunikasi*, 2021. Penulis juga memiliki sejumlah aktivitas menulis di Jurnal Nasional Terakreditasi maupun jurnal International bereputasi. Beberapa penelitian yang dilakukan didanai oleh Kemenristek tahun 2019 serta penelitian institusi yang didanai oleh perguruan tinggi. Pernah melakukan penelitian di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Morotai bersama SEMERU Institut Tahun 2013. Pemenang hibah bersaing ristek dikti sebanyak 2 kali tahun 2019. Menjadi penggiat pemilu yaitu aktif di Jaringan Pendidikan Pemilu Untuk Rakyat (JPPR) Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2022. Penulis dapat dihubungi melalui email: ipmummu@gmail.com, marno.wance@fisip.unpatti.ac.id atau WA 082248872091.

Suandi, S.Pd., M.Si



Penulis dilahirkan di Upang pada tanggal 23 Desember 1989. Masa kecil penulis penuh kegembiraan dilalui di desa Tanah Abang Selatan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan pendidikan yang di tempuhnya Diawali di SDN 2 Tanah Abang Pada tahun 1995, kemudian MTs YP Nurul Huda Tanah Abang pada tahun 2001 dan dilanjutkan ke SMK PGRI 01 Palembang pada tahun 2004. Pendidikan S1 Pada Program Studi Pendidikan Matematika. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan S2 di Pasca Sarjana Universitas Sjakhyakirti Palembang pada program Studi Administrasi Publik Pada Tahun 2014. Saat ini penulis mengabdikan sebagai dosen Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Sjakhyakirti Palembang dan Penulis juga adalah Awarde Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Pada Tahun 2019, Menempuh Program Doktor Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Padjadjaran.

Dr. Lusi Andriyani, M.Si



Penulis merupakan staff pengajar di Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menyelesaikan S1 di bidang Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga dengan tugas akhir berjudul: “Politik Pangan dan Kesejahteraan Petani”. S3 diselesaikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menyelesaikan S2 dengan tesis yang berjudul “Islam dan Politik Identitas: studi pada Partai Keadilan Sejahtera”. Menyelesaikan S3 di Program studi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan disertasi yang berjudul “Politik perkotaan Surabaya di Era Tri Rismaharini kasus Revitaliasi Kampung Dolly dan Reklamasi Pamurbaya”. Beberapa hasil riset yang pernah di hasilkan; Pemodelan Pengelolaan Konflik Pada Ormas Islam Dalam mendukung Penciptaan Kehidupan Demokrasi Tanpa Kekerasan (Dikti tahun 2014), Pemodelan Pengelolaan Konflik Pada Ormas Islam Dalam mendukung Penciptaan Kehidupan Demokrasi Tanpa Kekerasan, Pengembangan model pendidikan dan

pelatihan gender sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan *clean and good governance* bagi aparat pemerintahan desa di kota Tangerang Selatan (Dikti Tahun 2016), Militerisasi Sipil: Studi pada FPI dan Forkabi (UMJ tahun 2018), Kajian Relasi Kuasa Elit Lokal dan Pemerintahan Lokal dalam menangani konflik Pasca Pilkada (UMJ, tahun 2019), *The Power Interplay Closure Localization sex Commercial Dolly* Surabaya (Hibah Disertasi, 2019), Relasi Kuasa Elit Lokal dan Pemerintahan Lokal Dalam Penanganan Konflik Sosial Pasca Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial (UMJ, 2020). Mendapatkan dana pengmas DIKTI pada tahun 2014 dan tahun 2022. Menulis beberapa *paper* di jurnal nasional terakreditasi sinta, serta beberapa media *online*.

Dr. Dra. Marlinda Irwanti Poernomo, S.E., M.Si



Penulis merupakan seorang Akademisi yang juga politisi, perempuan yang lahir 16 Oktober 1964, ini mendapatkan titisan sebagai pengajar/dosen dari ayahnya Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H., M.Hum., Guru Besar fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menempuh pendidikan S1 di dua universitas, yaitu Universitas Gadjah Mada Sospol-HI, dan Universitas Islam Indonesia Ekonomi Manajemen, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Indonesia, Kajian Perempuan dan S3, di Universitas Islam Negeri/UIN Jakarta, dakwah dan Komunikasi, meniti karier selain sebagai Dosen, juga menjadi Penyiar TVRI dari tahun 80-90an, kemudian mengikuti pendidikan Lemhannas PPSA 18, pada tahun 2012, aktif di berbagai organisasi seperti Golkar, MKGR, MDI, menjadi Ketum Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia/FPPI, MAAI, wakil Ketua LK dan BPET Majelis Ulama Indonesia/MUI, Ketua KOWANI, dan organisasi *International Council of Women/ICW*, menjadi Dewan Pakar di ISKI, Perhumas, AspiKom. pembicara Nasional maupun Internasional, karier di pendidikan Ketua Sekolah Tinggi Interstudi, dosen di beberapa Perguruan tinggi, menjadi Anggota DPR 2014- 2019, di komisi X, dan saat ini menjadi Direktur Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta.

Joseph Eliza Lopulalan, S.Sos., M.A



Penulis merupakan bungsu dari empat bersaudara yang lahir di Namlea 05 Mei 1980, menjalani Sebagian besar masa pendidikannya di Ambon Maluku dan mendapat gelas S1 Administrasi Negara pada FISIP UNPATTI Ambon dan melanjutkan S2 pada Sosiologi UGM. Sehari-hari adalah Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Victory Sorong dan turut mengajar pada beberapa Sekolah Tinggi dan Universitas di Kota Sorong. Penulis aktif menulis pada beberapa jurnal dalam negeri dan jurnal Internasional. Bersama mahasiswa dan rekan dosen, penulis juga aktif melakukan Pengabdian kepada Masyarakat di Papua Barat. Penulis juga aktif terlibat dalam beberapa organisasi kemasyarakatan di Kota dan Kabupaten Sorong. Menikah dan mempunyai seorang istri dan tiga orang anak.

PENGANTAR ILMU POLITIK

Pengantar Ilmu Politik, mengantarkan para pelajar pada pemahaman dasar ilmu politik, sehingga para pelajar memahami pengertian dasar, konsep dasar, ruang lingkup bahasan, mendefinisikan peristiwa politik, dan memahami manfaat pembelajaran ilmu politik. Dimulai dari pemahaman umum, apa itu Politik, para pelajar diajak untuk berpikir tentang hakikat ilmu politik, manusia, yang dalam keseharian kehidupannya, tak lepas dari peristiwa politik, mereka terlibat langsung dalam kegiatan politik. Karena itulah, tidak ada alasan untuk tidak belajar ilmu politik. Dalam pemahaman berikutnya, para pelajar diajak berpikir dan mendiskusikan, apa itu Ilmu Politik, apa saja yang dipelajari, mengapa ilmu politik Ada, bagaimana Ilmu Politik Dibangun.

Pembahasan berlanjut, dari hal-hal yang biasa diamati mahasiswa sehari-hari, yang dapat dikategorikan dan didefinisikan sebagai kegiatan dan peristiwa politik, yakni yang kira-kira dapat dianggap sebagai Objek Kajian ilmu politik (landasan Ontologis ilmu politik), ke hal-hal yang bersifat substansial dari mana dan bagaimana ilmu politik Dibangun (landasan Epistemologis ilmu politik). Disinilah para pelajar dikenalkan dengan dasar-dasar Filsafat Politik, Pemikiran Politik, Ideologi. Politik, dan mendiskusikannya serta menariknya ke ranah kontekstual kekinian, yakni tentang bagaimana kira-kira filsafat, pemikiran dan ideologi dan teori politik tersebut dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa politik. Dalam kaitan ini para pelajar juga diperkenalkan pada Pendekatan yang digunakan untuk mempelajari ilmu politik, Konsep Dasar ilmu politik dan Asumsi Dasar ilmu politik. Dilanjutkan dengan membahas sub-sub materi bahasan ilmu politik, seperti: negara, pemerintahan, birokrasi, kebijakan publik, *civil society*, sistem kepartaian, pemilu, kepemimpinan politik, konflik, perilaku, partisipasi politik, sistem politik, pembangunan politik, politik global, hubungan internasional, para pelajar diajak dalam pemikiran tentang manfaat pembelajaran ilmu politik, hingga secara aplikatif-kontekstual.

Inilah landasan Aksiologis ilmu politik. Ilmu politik bukanlah ilmu yang berhenti di angkasa, melainkan merupakan Ilmu yang dilandaskan atas Metode ilmiah, dan dapat digunakan. Menilik keluasan spektrum kajian ilmu politik, para pelajar dipersilakan untuk mencoba memikirkan dan mencontohkan jangkauan peristiwa, kajian ilmu politik, yang kemudian disinkronkan dengan metode *brainstorming* dan diskusi, untuk dideskripsikan secara sistematis, ke dalam beberapa pembahasan kelas.